

## MODEL PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KETERAMPILAN UNTUK BISNIS SAK ETAP PELATIHAN PESERTA ALUMNI KOPERASI DI JAWA TIMUR UNTUK MEMASUKI MEA

Alberta Esti Handayani<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi Univ. Dr. Soetomo Surabaya

Email : [albertaesti@gmail.com](mailto:albertaesti@gmail.com)<sup>1)</sup>

Damajanti Sri Lestari<sup>2)</sup>

<sup>2)</sup>Fakultas Ilmu Administrasi Univ. Dr. Soetomo Surabaya

[yantilestari69@yahoo.co.id](mailto:yantilestari69@yahoo.co.id)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan Republik Kecil dan Menengah Republik Indonesia NO: 12 / Per / M.KUKM / IX / 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi untuk Sektor Riil Koperasi yang menyebutkan bahwa koperasi sektor riil tidak memiliki akuntabilitas publik, maka laporan keuangan yang disyaratkan mengacu pada Entitas Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP untuk pelatihan peserta Koperasi Alumni bisnis di Jawa Timur, khususnya di Probolinggo dalam hal ini yang ditunjuk adalah: Koperasi Serbaguna Bisnis "Perempuan Sejahtera Leces Permai" Koperasi Wanita " Dahlia ", dan KPRI " Wanita Sejahtera "

Hasil penelitian ini menunjukkan dari tiga koperasi yang ditunjuk, masih memerlukan bantuan dalam menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP.

Kata kunci: laporan keuangan, SAK ETAP

### I. PENDAHULUAN

Koperasi adalah lembaga yang anggotanya memiliki kepentingan yang relatif homogen berkumpul untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Koperasi juga merupakan bentuk bisnis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini koperasi di Indonesia masih berkembang menuju tahap yang lebih baik. Laporan Keuangan

adalah bagian dari laporan pertanggungjawaban untuk satu periode akuntansi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai pekerjaan manajemen koperasi. Untuk menyusun laporan keuangan dibutuhkan suatu pedoman, agar laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pedoman diperlukan untuk keseragaman masing-masing laporan keuangan yang dibuat oleh

perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan juga bertujuan untuk memudahkan pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan masing-masing perusahaan. Saat ini, Indonesia memiliki empat standar keuangan yaitu IAS berbasis IFRS, IAS syariah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan SAK ETAP. Entitas Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengacu pada Standar Pelaporan Keuangan Internasional untuk Entitas Kecil dan Menengah (IFRS untuk UKM). Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan kemudahan bagi suatu entitas dibandingkan dengan GAAP umum dengan persyaratan pelaporan yang lebih kompleks. SAK ETAP digunakan untuk perusahaan dengan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan tujuan umum (*general purpose financial statement*) untuk pengguna eksternal. SAK ETAP yang didirikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Koperasi Berbasis Laporan Keuangan SAK ETAP Untuk bisnis dalam rangka Laporan Keuangan seperti yang diinstruksikan oleh Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP untuk memberikan informasi keuangan dari

kewajiban perusahaan dalam pengambilan keputusan koperasi yang teratur dan transparan dalam perumusan harus sesuai dengan pedoman umum akuntansi Koperasi .

## II. METODOLOGI

Tahapan dalam penelitian ini meliputi persiapan, implementasi, evaluasi dan penutupan. Rincian setiap fase adalah sebagai berikut:

### 1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah

Pada tahap ini diidentifikasi tiga koperasi dengan menggunakan dua instrumen yang telah disiapkan, lembar pertama dan kedua Lembar Data Koperasi Identifikasi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Bersamaan dengan pembekalan dengan instrumen yang ada, juga melakukan wawancara / diskusi dengan Dewan Eksekutif dan Pengawas. Hasil kegiatan ini dicatat pada lembar kedua instrumen untuk masing-masing koperasi. Suatu analisis terbaru dari catatan data yang diinstrumen, akan digunakan sebagai referensi untuk kegiatan bimbingan, konseling dan pendampingan berikutnya (kunjungan kedua).

### 2. Memberikan bimbingan, konsultasi dan bantuan

Menindaklanjuti hasil analisis pada tahap pertama, kegiatan bimbingan, konsultasi dan bantuan meliputi:

- Masalah Aspek penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

- Memberikan panduan yang harus dipenuhi dalam menyiapkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

3. Merekomendasikan dan mengimplementasikan  
Setelah menerapkan pedoman kegiatan, konsultasi dan bantuan, maka tim dapat merekomendasikan kepada dewan koperasi untuk memperbaiki semua kekurangan dalam hal menyiapkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Selain itu, manajemen koperasi harus segera menerapkan rekomendasi bahwa kinerja koperasi dapat ditingkatkan.

4. Monitoring dan Evaluasi hasil implementasi. Evaluasi hasil implementasi dilakukan dengan maksud untuk melihat sejauh mana (peningkatan kinerja) koperasi terhadap implementasi hasil yang telah dilakukan oleh Dewan pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

### III. PEMBAHASAN

Pada identifikasi peristiwa pertama dan analisis masalah, kondisi yang ada di masing-masing koperasi adalah sebagai berikut

1. KSU Perempuan Sejahtera Leces Permai

- Penyusunan laporan keuangan telah dilakukan, proses dan prosedur prosesnya cukup baik dan sudah sesuai dengan GAAP ETAP (Entitas Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik),

walaupun belum sepenuhnya standar yang harus dilakukan. Jadi itu perlu disempurnakan agar sesuai dengan SAK ETAP.

- Rekaman dalam akun pengeluaran piutang menggunakan basis kas, sehingga perlu ditingkatkan menjadi basis akrual.

- Perlu melakukan perhitungan untuk depresiasi aset tetap.

- Persiapan perubahan ekuitas belum dilakukan.

- Catatan atas laporan keuangan juga harus dibuat untuk meningkatkan laporan keuangan yang disiapkan.

2. Kopwan Dahlia

- Penyusunan laporan keuangan telah dilakukan, proses dan prosedur prosesnya cukup baik dan sudah sesuai dengan GAAP ETAP (Entitas Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik) walaupun belum sepenuhnya dilakukan semuanya. Jadi itu perlu disempurnakan agar sesuai dengan SAK ETAP.

- Pendaftaran untuk biaya tunai masih menggunakan basis, sehingga diharapkan dapat diubah untuk menggunakan basis akrual sesuai dengan GAAP untuk ETAP.

- Pendaftaran untuk penjelasan laporan keuangan belum lengkap

3. KPRI Sejahtera

Penyusunan laporan keuangan telah dilakukan, proses dan prosedur prosesnya cukup baik dan lengkap sesuai dengan GAAP ETAP (Entitas Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik) hanya perlu perbaikan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan GAAP untuk ETAP.

Pada tahap bimbingan, konseling dan pendampingan ini, secara umum penyusunan laporan keuangan yang baik dan cukup lengkap di tiga koperasi ditunjuk. Hanya saja masih banyak standar yang diperlukan dalam SAK ETAP. Dalam bantuan konsultasi, telah dilakukan hal-hal berikut:

- Panduan dalam membuat entri penyesuaian berdasarkan pada basis akrual.
- Panduan dalam membuat jurnal untuk piutang yang tidak dapat ditagih.
- Panduan dalam membuat analisis umurpiutang.
- \*Panduan dalam pencatatan dalam mengalokasikan SHU.
- Panduan dalam menyelesaikan persiapan catatan sesuai dengan SAK ETAP.

Pada tahap pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi hasil, kondisi yang ada di tiga koperasi adalah sebagai berikut:

Aspect	Before Assistance	After Assistance
<b>Aspek Dalam Piutang</b>		
Account Receivables Allowance for Losses	Not yet	Formed Losses of Account Receivables
Treatment of account receivables that are not billable	No Action	Removal of account receivables
Aging schedule of account receivable	Not yet	Gradually began to compile a book of account receivables

		and aging schedule analysis
<b>Fixed Asset</b>		
Depreciation of fixed asset	Not yet	Gradually begin to do
Making ledger of fixed asset	Not yet	Gradually begin to do
<b>Statement of Change equity</b>		
Statement of change equity	Nothing	Gradually begin to do
<b>Analyze of financial statement</b>		
Analyze of financial statement	Nothing	Gradually begin to do
systems and recording procedures	Manual	Change to komputerized

#### IV. KESIMPULAN

Koperasi sebagai badan hukum harus mematuhi aturan dan peraturan / perundang-undangan yang berlaku, serta untuk penyusunan laporan keuangan. Sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, diperlukan Menteri Keuangan dan Usaha Kecil dan Menengah no. 12 2015 bahwa penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan SAK ETAP. Dalam penelitian Model Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Untuk Peserta Pelatihan Kerja Sama Alumni Di Jawa Timur, khususnya di Probolinggo di KSU Perempuan Sejahtera Leces Permai, Kopwan Dahlia, dan KPRI Sejahtera diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disiapkan oleh SAK ETAP namun masih berdasarkan uang tunai (cash basis)

2. Mengikuti bimbingan dan bantuan dalam penyusunan laporan keuangan, dewan koperasi mulai membuat perbaikan pada laporan keuangannya

3. Dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi ketiga koperasi rata-rata meningkatkan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang RI No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian
- Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang RI No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Yang Berkeadilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 s.d 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No 1/KEP/M.KUKM/I/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 351/KEP/M/XII/1998).
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 04/PER/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 12/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, IAI
- Rudianto, Akuntansi Koperasi, 2010, Erlangga, Jakarta